

BAB I

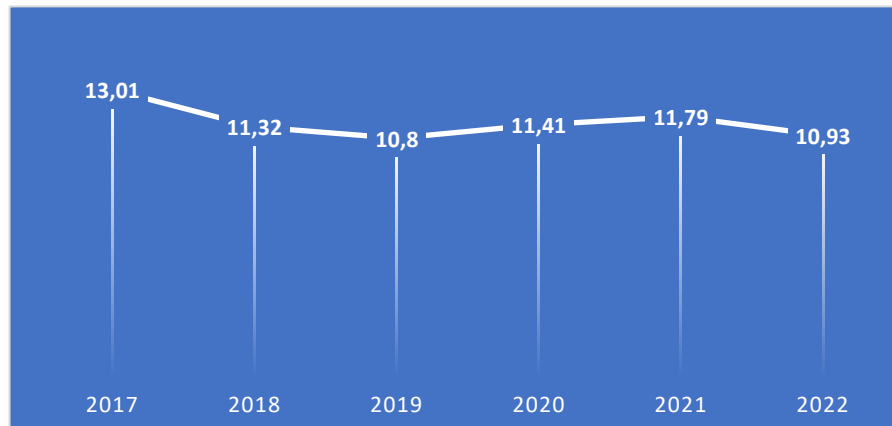
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah multi dimensi yang dihadapi oleh negara-negara di dunia. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum (Kuncoro, 1997). Keberagaman dalam definisi kemiskinan dikarenakan masalah tersebut telah merambat pada level multidimensional, artinya kemiskinan berkaitan satu sama lain dengan berbagai macam dimensi kebutuhan manusia. Ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum yang sesuai dengan tingkat kelayakan hidup dapat dikatakan sebagai kemiskinan (Todaro, 2006) (Wahyudi & Rejekingsih, 2013). Keadaan ekonomi di Jawa Tengah menciptakan situasi kompleks yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satu tantangan utama yang muncul adalah kesulitan akses pendidikan di beberapa wilayah, mengakibatkan ketidaksetaraan dalam peluang pendidikan bagi berbagai lapisan masyarakat (Sugiharti et al., 2019). Hal ini menimbulkan kesenjangan dalam pengembangan keterampilan dan pengetahuan, menjadi hambatan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Selain itu, perhatian terhadap tingkat pengangguran terbuka meningkat karena terbatasnya peluang kerja, meningkatkan risiko kehilangan mata pencaharian bagi sebagian orang. Tantangan lainnya muncul dalam hal keterbatasan layanan kesehatan dan

akses terhadap pelayanan kesehatan berkualitas, yang menjadi hambatan utama dalam meningkatkan produktivitas ekonomi dan memperburuk kondisi kemiskinan. Infrastruktur yang terbatas, termasuk akses transportasi yang buruk dan layanan dasar yang kurang memadai, juga menambah hambatan dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan peluang ekonomi. Di samping itu, faktor-faktor global seperti fluktuasi perekonomian global dan perubahan iklim semakin memberikan tekanan pada kondisi perekonomian lokal (Rohmah, 2022).

Kemiskinan menjadi tantangan serius bagi pembangunan ekonomi dan sosial di Jawa Tengah, sebuah provinsi padat penduduk di Indonesia. Meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi yang signifikan, masalah kemiskinan tetap kompleks. Tahun 2017-2022 menjadi periode kritis untuk memahami dinamika ini melalui indikator seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Partisipasi Angkatan Kerja (PAK). Perkembangan ekonomi yang positif di Jawa Tengah tidak selalu mencerminkan peningkatan kesejahteraan seluruh penduduk. Tantangan serius terkait kemiskinan, seperti tingkat pengangguran yang tinggi di beberapa daerah, mengakibatkan ketidakamanan ekonomi, sedangkan ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan menjadi hambatan bagi pembangunan yang inklusif. Faktor-faktor ini, bersama dengan distribusi ekonomi yang tidak merata, menyebabkan ketidaksetaraan dan kesenjangan sosial yang signifikan.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) diolah

Gambar 1. 1 Hasil persentase Penduduk Miskin Di Jawa Tengah selama 6 tahun terakhir

Pada tahun 2017, angka kemiskinan di Jawa Tengah mengalami lonjakan signifikan, mencapai puncak tertinggi sebesar 13,01%, seperti terlihat dalam Grafik 1. Kemudian, dari tahun 2018 hingga 2019, terjadi penurunan persentase menjadi 11,32 dan 10,8 secara berturut-turut. Namun, di tahun 2020 dan 2021, persentase kembali meningkat menjadi 11,41 dan 11,79 situasi ekonomi yang stagnan akibat pandemi Covid-19 menjadi faktor penghambat. Pada tahun 2022 situasi mulai membaik, dan secara perlahan kembali normal meskipun masih dalam tahap pemulihan. Hal ini tercermin dalam penurunan persentase penduduk miskin menjadi 10,93. Upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah membuahkan hasil. Pada bulan Maret 2023, angka kemiskinan di provinsi ini berhasil diturunkan menjadi 10,77 persen. Persentase penduduk miskin di Jawa Tengah menunjukkan tren positif dengan penurunan 0,21 persen poin dibandingkan

September 2022. Sedangkan, Maret 2022 Jawa Tengah mencatat penurunan persentase penduduk miskin yang lebih signifikan, yaitu 0,16 persen poin.

Keterkaitan IPM dengan kemiskinan tidak dapat diabaikan. IPM merupakan indikator penting untuk menilai efektivitas upaya dalam memajukan taraf hidup masyarakat. IPM mencerminkan akses masyarakat terhadap aspek-aspek fundamental seperti pendapatan, kesehatan, dan pendidikan, yang bila terpenuhi dapat membantu mereka keluar dari jeratan kemiskinan (BPS, 2016). Penelitian sebelumnya, seperti karya Whisnu Adi Saputra (2011), Prima Sukmaraga (2011), dan Noor Zuhdiyaty serta David Kaluge (2017), menegaskan IPM ternyata berdampak negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga menjadi faktor yang potensial menyebabkan kemiskinan. Puncak pendapatan dapat dicapai ketika kondisi ketenagakerjaan mencapai penuh (full employment). Peningkatan signifikan dalam jumlah tenaga kerja yang tidak diimbangi dengan laju pertumbuhan lapangan pekerjaan yang memadai dapat memperparah masalah pengangguran di suatu daerah. Tingginya tingkat pengangguran dapat mencerminkan ketidakberhasilan pembangunan suatu negara, seperti yang dinyatakan oleh Rahmawati pada tahun 2017. Sejumlah studi, termasuk penelitian oleh Prima Sukmaraga (2011), Dicky Wahyudi dan Tri Wahyu Rejekiningsih (2013), Asrianti (2017), Irhamni (2017), dan Zalecha Noor Afda (2018), menunjukkan temuan sejalan bahwa tingkat

pengangguran berdampak positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan (Nuraeni Handayani, 2022).

Perubahan dalam tingkat kemiskinan mungkin berhubungan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yaitu Total nilai barang dan jasa yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi di sebuah wilayah. PDRB berfungsi sebagai penanda pertumbuhan ekonomi, mencerminkan kesehatan ekonomi daerah tersebut. Dalam definisinya, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencerminkan total bersih dari seluruh barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai aktivitas ekonomi di suatu daerah dalam periode waktu tertentu (Hadi Sasana, 2006).

Semakin rendah PDRB suatu wilayah, makin terbatas peluang pendapatan yang dapat diperoleh di wilayah tersebut. artinya PDRB berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif (Dio syahrullah, 2014). Teori neo klasik memberikan penjelasan PDRB menjadi tolak ukur bagi perkembangan ekonomi daerah (Faritz & Soejoto, 2020). Pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi dari pembangunan yang dapat melihat kemajuan atau kemunduran kegiatan perekonomian pada kurun waktu tertentu. Perkembangan atau penurunan ekonomi dapat dinilai dari banyaknya barang dan jasa yang diproduksi oleh sebuah wilayah. Jika produksi barang dan jasa meningkat, kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat (Rohmah, 2022).

Partisipasi Angkatan Kerja (PAK) juga memiliki potensi untuk memengaruhi tingkat kemiskinan. Salah satu parameter yang digunakan

untuk menilai kemiskinan adalah Tingkat Partisipasi Penduduk Usia Kerja, yang mencerminkan jumlah individu yang terlibat dalam kegiatan ekonomi selama rentang usia kerja (Meyvi Rine Mirah, Paulus Kindanen, 2020). Apabila PAK rendah, hal ini dapat mengakibatkan penurunan produktivitas dan pendapatan masyarakat, menyebabkan kenaikan tingkat kemiskinan. Dengan demikian, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja memiliki dampak negatif terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.

Berbagai studi terkait kemiskinan yang telah dilakukan sebelumnya, seperti penelitian (Martini & Woyanti, 2023) dengan judul “ Analisis Pengaruh PDRB, IPM, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan 35Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah (2016-2020) “ menemukan bahwa PDRB dan IPM berpengaruh signifikan, sedangkan penelitian (Andhykha et al., 2018) dengan Judul "Analisis Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran, dan IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah" menunjukkan studi tersebut menemukan pengaruh yang signifikan dari PDRB dan IPM terhadap tingkat kemiskinan, meskipun dengan variasi pada alat analisisnya yaitu menggunakan Fixed Effect Model (FEM). Sementara penelitian yang dilakukan (Widowati et al., 2018) dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001-2018 “menunjukkan bahwa Pengangguran berpengaruh signifikan.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang diatas, ditemukan adanya variasi dalam hasil penelitian terdahulu serta

adanya perbedaan. Dalam penelitian sebelumnya kebanyakan menggunakan beberapa variabel seperti Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Produk Domestik Regional Bruto untuk meneliti faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Membuat peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian baru dengan mengambil data pada tahun 2017-2022 karena pada tahun tersebut sedang terjadi pandemi Covid-19 yang mana membuat tingkat kemiskinan menurun. Serta menggabungkan variabel Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran terbuka, PDRB, dan menambahkan variabel lain yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.

Penelitian yang dilakukan (Rohmah, 2022) meneliti Partisipasi Angkatan Kerja yang menunjukkan memiliki pengaruh terhadap kemiskinan. Serta pada penelitian sebelumnya masih banyak yang menggunakan (Fixed Effect Model). Oleh sebab itu, peneliti pada kesempatan ini menggunakan alat analisis (Random Effect Model) yang digunakan untuk menganalisis beberapa faktor yang berjudul “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, PDRB, dan Partisipasi Tenaga kerja Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2017-2022”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan pada latar belakang, peneliti kemudian merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2017-2022?
2. Bagaimana pengaruh TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2017-2022?
3. Bagaimana pengaruh PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2017-2022?
4. Bagaimana pengaruh PAK (Partisipasi Angkatan Kerja) Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2017-2022?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan isu yang telah dibahas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi:

1. Untuk mengetahui pengaruh IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2017-2022?
2. Untuk Mengetahui pengaruh TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2017-2022?
3. Untuk mengetahui pengaruh PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2017-2022?
4. Untuk mengetahui pengaruh PAK (Partisipasi Angkatan Kerja) Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2017-2022?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah diberikan, hasil riset menyajikan manfaat berikut ini:

1. Secara Teoritis

Diharapkan temuan dari penelitian ini dapat menjadi sumber informasi berharga bagi para peneliti dan pembaca untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai variabel yang memengaruhi tingkat kemiskinan di wilayah Jawa Tengah. Selain itu, diharapkan ini juga bisa berfungsi sebagai sumber informasi yang berharga dan acuan bagi studi-studi mendatang yang akan mengulas permasalahan kemiskinan di wilayah tersebut.

2. Secara Praktis

- a. Bagi pemerintah

Sebagai masukan penting dan pertimbangan yang diperlukan oleh Pemerintah dalam merancang strategi serta kebijakan untuk menangani masalah kemiskinan di Jawa Tengah

- b. Bagi Masyarakat

Diharapkan analisis ini dapat memperluas pemahaman publik tentang bagaimana Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, Produk Domestik Regional Bruto, dan Partisipasi Angkatan Kerja memengaruhi tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.

3. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini memberikan pengetahuan baru serta meningkatkan pemahaman tentang bagaimana Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, Produk Domestik Regional Bruto, dan Partisipasi Angkatan Kerja mempengaruhi kemiskinan di Jawa Tengah.